

SEBUAH (INGATAN) YANG TERABAikan: PERJUANGAN SEMESTA (PERMESTA) 1957-1961 DI SULAWESI UTARA

(A NEGLECTED MEMORY: THE UNIVERSAL STRUGGLE (PERMESTA) 1957-1961 IN NORTH SULAWESI)

Hendri Gunawan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Prov. Sulawesi Utara
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V
Telepon (0431) 864926 / Faksimile (0431) 864926
Email: hendrygunawan2010@yahoo.com

Muhammad Anggie Farizqi Prasadana

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Program Studi Ilmu Sejarah
Email: anggie_farizqi@yahoo.com

Abstract

The memory of the Permesta incident that occurred in the East Indonesia under Ventje Sumual's leadership is still clearly recorded in the minds of the fighters. This research aims to reveal the form of collective memory which is able to unite and encourage the struggle of the East Indonesian people in the Permesta forum in order to alleviate poverty and underdevelopment in their regions. This study uses a historical method that started from heuristics source collection, source criticism, interpretation, and writing the results. The results showed that the collective memory of people's suffering burden due to Dutch colonialism, and the strong unity between the people and the army that work together to defend Indonesian independence, and the role of Duumvirate of Soekarno-Hatta in uniting all elements of society, to be a memory that encouraged Permesta to provide resistance toward the injustice of centre government of Jakarta.

Keywords: *Permesta, Ventje Sumual, collective memory.*

ABSTRAK

Ingatan mengenai peristiwa Permesta yang terjadi di wilayah Indonesia Timur di bawah kepemimpinan Ventje Sumual masih terekam jelas di benak para bekas pejuangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk memori kolektif yang mampu mempersatukan dan mendorong perjuangan orang-orang Indonesia Timur dalam wadah Permesta guna mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dimulai dari pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik sumber, menginterpretasinya, dan yang terakhir menuliskan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memori kolektif mengenai beban penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda, serta kuatnya persatuan antara rakyat dan tentara yang bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan peran dwitunggal Soekarno-Hatta dalam mempersatukan seluruh elemen masyarakat, menjadi ingatan yang mendorong Permesta memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat Jakarta.

Kata kunci: Permesta, Ventje Sumual, memori kolektif.

PENDAHULUAN

Salah satu penggalan sejarah Indonesia yang sangat menarik untuk dikaji adalah peristiwa “Proklamasi Perjuangan Semesta Alam” yang dikumandangkan pada tanggal 2 Maret 1957 di kota Makassar. Para tokoh militer dan politik dari berbagai kalangan dan

daerah di wilayah Indonesia Timur turut serta dalam peristiwa yang berlangsung pada pukul 3 dini hari tersebut. Antusiasme akan proklamasi itu tidak hanya menggema di Makassar selaku ibukota Provinsi Sulawesi sekaligus Markas Tentara Teritorium VII/Wirabuana, tetapi dalam waktu singkat juga meluas hingga ke

pelosok-pelosok daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Utara.

Proklamasi di Makassar itu melahirkan gerakan yang dinamakan Perjuangan Rakyat Semesta Alam (Permesta). Tuntutan utama dari gerakan ini adalah pemberlakuan desentralisasi dan keseimbangan anggaran keuangan antara pusat dan daerah. Alasannya adalah selama dekade 50-an daerah-daerah di luar Jawa merupakan kontributor terbesar bagi keuangan nasional, terutama yang dihasilkan dari berbagai komoditi ekspor. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan semua komoditi ekspor dari berbagai daerah harus diekspor melalui Pulau Jawa. Namun, yang jadi masalah, hasil penjualan ekspor itu bukan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di luar Jawa, melainkan lebih banyak untuk pembangunan di Pulau Jawa. Apabila kebijakan pemerintah itu dibiarkan, maka akan semakin memperluas kesenjangan antara pusat dan daerah (Tengker, 2009: 15-16).

Alhasil, gerakan Permesta yang dimotori oleh Kolonel Ventje Sumual (Panglima Teritorium VII Wirabuana) itu memperoleh simpati luas dari masyarakat, termasuk di wilayah Sulawesi Utara, yang merasakan ketimpangan pembangunan di daerahnya. Masyarakat luas secara spontan membenarkan tujuan dari gerakan ini dan menjadi pendukung fanatiknya (Sulu, 1997: 12). Oleh sebab itu, wilayah Sulawesi Utara dijadikan lingkup spasial dalam penelitian ini. Pertimbangan lainnya, salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang bernama Indraloka Kinilow dijadikan markas utama Permesta oleh Ventje Sumual. Maka, tidak mengherankan apabila Kota Manado yang berstatus sebagai ibukota Sulawesi Utara menjadi wilayah yang diserang pertama kali oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Adapun lingkup temporal studi ini meliputi periode 1957 hingga 1961. Tahun 1957 Sumual memproklamasikan berdirinya gerakan Permesta. Sementara tahun 1961 dipilih sebagai batas temporal akhir lantaran beberapa gerombolan Permesta menyerah di Sulawesi Utara, sedangkan beberapa pemimpinnya ditahan di Jakarta.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) apa visi dan misi Permesta? (2) kenapa Permesta berani melawan ketidakadilan dari

pemerintah pusat? (3) apa saja yang menjadi faktor pendorongnya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran memori kolektif masyarakat Indonesia Timur mengenai keadaan pada periode kolonial dan revolusi fisik terhadap perlawanan Permesta untuk menuntut otonomi daerah yang lebih luas.

Kajian ini meneliti tentang Permesta dari segi memori kolektif yang mendasari gerakannya, sehingga studi mengenai ingatan perlu disajikan disini. Salah satu studi tentang memori kolektif adalah buku hasil suntingan Budiawan yang berjudul “Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu” (Budiawan, 2015). Dalam kajiannya yang merupakan sebuah kumpulan tulisan itu, kita dapat mengetahui bagaimana kerangka penulisan tulisan tentang memori kolektif. Ingatan kolektif adalah ingatan yang dipegang bersama oleh sebuah komunitas.

Kajian mengenai Permesta ditulis oleh Phil M. Sulu yang berjudul “Permesta: Jejak-jejak Pengembaraan” (Sulu, 1997). Buku ini mengulas Permesta berdasarkan kesaksian langsung dari penulisnya yang kala itu menjadi seorang wartawan muda, yang merasakan dan mengalami sendiri pergolakan berdarah tersebut. Pekerjaannya sebagai seorang jurnalis menjadikannya dapat mengembara ke berbagai wilayah perang dan merekam langsung bagaimana peristiwa itu terjadi.

Karya serupa yang mengamati langsung jalannya peristiwa Permesta adalah tulisan dari Benny Tengker (Tengker, 2009). Benny merupakan mantan anggota Permesta di bawah kepemimpinan Ventje Sumual. Menurutnya, Permesta bukanlah sebuah pemberontakan sebagaimana narasi sejarah yang dibentuk Orde Baru. Permesta hanya menuntut otonomi daerah lantaran selama ini pemerintah pusat mengambil kekayaan alam dari daerah-daerah, tetapi tidak untuk membangun infrastruktur daerah yang bersangkutan, malah untuk pembangunan di Jawa. Kendati karya ini ditulis oleh orang yang mengalaminya langsung, unsur subjektifnya begitu kentara, sehingga perlu dilakukan kritik sumber yang hati-hati. Sangat dimaklumi lantaran penulis bukanlah seorang sejarawan. Kelemahan inipun diakui sendiri oleh penulisnya.

Tulisan lain yang mengkaji tentang Permesta adalah karya Adolf Sinolungan yang berjudul “Ideologi Pancasila dan Permesta” (Sinolungan, 2016). Adolf mengulas Permesta dari segi ilmu hukum. Lebih lanjut, Adolf membandingkan ideologi Permesta dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara ideologi Permesta dengan Pancasila. Oleh sebab itu, tindakannya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pemberontakan atau makar, sehingga perlu dilakukan upaya pelurusan sejarah Permesta. Sama seperti tulisan yang disebutkan sebelumnya, karya ini juga kental aroma subjektivitasnya.

Setelah meninjau kelebihan dan kekurangan beberapa tulisan di atas, maka artikel ini bermaksud untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Tulisan ini memotret Permesta dari sudut pandang ingatan kolektif yang melandasinya. Dengan menggunakan metode sejarah kritis, diharapkan karya ini dapat meminimalisasi subjektivitas dalam penulisannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis yang diawali dengan pengumpulan sumber (*heuristik*). Sumber yang digunakan terdiri dari primer dan sekunder. Salah satu sumber primernya adalah “Pernyataan Korps Perwira SSKAD” yang dikeluarkan pada 21 Maret 1957. Sumber primer lainnya yaitu wawancara dengan salah satu tokoh Permesta, Wim Dompas, pada tanggal 14 Februari 2010 di Manado. Sementara sumber sekunder diperoleh dari berbagai perpustakaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Sumber primer yang digunakan dipastikan sezaman dengan peristiwanya. Setelah melakukan kritik, kesemua sumber itu diinterpretasi dan baru kemudian dituliskan hasilnya.

PEMBAHASAN

Visi dan Misi Permesta

Penandatanganan “Piagam Perjuangan Semesta Indonesia Bagian Timur” pada tanggal 2 Maret 1957 langsung disusul dengan “Proklamasi” oleh Panglima TT VII/ Wirabuana, Letnan Kolonel H.N. Ventje Sumual, yang mengumumkan pemberlakuan Daerah Teritorium

VII/Wirabuana berada dalam keadaan darurat perang dan berkuasanya Pemerintahan Militer sesuai Pasal 129 UUD Sementara 1950. Penting untuk dicatat terdapat penegasan dari Sumual bahwa proklamasi itu tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia (Piagam Perjuangan Semesta dalam wilayah TT-VII Wirabuana”, 2 Maret 1957).

Piagam Permesta di atas memuat tujuan perjuangan pada tingkat daerah dan nasional. Perjuangan pada tingkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Keutuhan Indonesia Timur sebagai satu kesatuan wilayah pertahanan yang penting sekali.
2. Pentingnya Indonesia Timur dalam perjuangan pembebasan Irian Barat sebagai basis militer dan politik-psikologis.
3. Pemberian otonomi luas kepada empat provinsi di Indonesia Timur.
4. Wujud otonomi luas dengan memberikan porsi 70% untuk daerah dan 30% untuk pusat bagi daerah surplus, sementara daerah minus 100% hasilnya untuk daerah itu sendiri, ditambah subsidi dari pusat.
5. Peluang melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan kepada setiap provinsi.
6. Pembagian yang adil dalam devisa, kredit, dan pampasan perang Jepang sesuai luas daerah masing-masing.
7. Memberi peluang melakukan barter dengan luar negeri.
8. Pemberian kesempatan memperoleh pendidikan secara adil, baik di dalam maupun ke luar negeri bagi siswa Indonesia Timur.
9. Mengerahkan tenaga militer bekerja sama dengan rakyat setempat dalam mengerjakan program-program pembangunan daerah.
10. Menjamin kehidupan yang layak bagi veteran termasuk yang cacat.
11. Jaminan untuk para janda pejuang kemerdekaan, yatim piatu, termasuk korban Westerling di Sulawesi Selatan.
12. Pemeliharaan makam pahlawan dan tempat ibadah ditanggung pemerintah.

Tujuan perjuangan di atas menunjukkan misi luhur Permesta. Secara tersirat Permesta hendak menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga sudah seharusnya memperoleh hak untuk memanfaatkannya guna kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu, Permesta menuntut pemerintah pusat supaya lebih bersikap adil dalam pembagian ekonomi dengan daerah.

Selama ini pemerintah pusat cenderung hanya memperhatikan Pulau Jawa dan mengabaikan pembangunan di luar Jawa. Alasannya karena di Jawa terdapat ibukota negara dan kota-kota besar serta dihuni oleh mayoritas kaum politisi sipil dan penduduk negara Indonesia (Ricklefs, 1998: 357). Dalam rangka mensubsidi perekonomian impor Jawa, pemerintah mempertahankan rupiah pada nilai tukar yang tinggi. Tindakan ini menyebabkan kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah di luar Jawa yang perekonomiannya berorientasi ekspor, sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian besar kepentingan-kepentingan dagang dan industri. Kebijakan itu juga mendorong munculnya pasar-pasar gelap dan tindakan penyelundupan (Ricklefs, 1998: 357).

Kebijakan itu kian diperparah dengan kaburnya kapal-kapal milik perusahaan pelayaran Belanda (KPM) dari perairan Indonesia lantaran hendak diambil alih oleh serikat buruh PNI dan PKI. Penyitaan itu merupakan akibat dari gagalnya PBB mengesahkan suatu resolusi pada tanggal 29 November 1957 untuk merundingkan masalah Irian barat dengan Belanda. Hilangnya kapal-kapal KPM menyebabkan putusnya pelayaran antar pulau dan semakin meningkatkan perasaan tidak puas daerah atas tindakan-tindakan yang diambil Jakarta (Ricklefs, 1998: 393-394).

Selanjutnya, tujuan perjuangan tingkat nasional sebagaimana yang tercantum di dalam piagam itu adalah sebagai berikut:

1. Menghapus sistem sentralisme yang menjadi penyebab korupsi dan stagnasi pembangunan daerah.
2. Memohon kepada Pemerintah Pusat agar mau memberikan otonomi yang luas kepada Daerah.

3. Perlu membentuk Majelis Tinggi atau Senat di samping DPR (Parlemen) sebagai wakil Daerah-daerah.
4. Perlu dibentuk kabinet presidensial dengan masa tugas lima tahun.
5. Dewan Nasional dan Kabinet harus dipimpin kembali oleh dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai simbol pemersatu bangsa.
6. Penyegaran dalam kepemimpinan Angkatan Perang khususnya Angkatan Darat.

Tujuan Permesta pada tingkat nasional sama dengan tingkat daerah, yakni menuntut otonomi daerah. Namun, pada piagam di atas disertakan pula faktor penyebab perlunya desentralisasi dan langkah konkret untuk mewujudkannya. Otonomi daerah diwujudkan dengan menempatkan wakil-wakil daerah dalam senat sebagai lembaga baru yang berdampingan dengan parlemen. Selain itu, kabinet parlementer yang mendominasi sistem pemerintahan selama dasawarsa 50-an diganti dengan sistem presidensial dengan masa bakti 5 tahun (Ricklefs, 1998). Piagam Permesta itu kemudian mengemukakan faktor pendorong pentingnya otonomi daerah.

Faktor yang pertama adalah eksistensi sistem sentralisme yang menyebabkan suburnya praktik korupsi dan *mandek*-nya pembangunan daerah. Permesta mengusulkan supaya sistem itu diganti dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Para pemimpin Permesta masih trauma dengan sistem sentralistik ketat yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem itu menyebabkan Indonesia tak ubahnya seperti sapi perahan yang kekayaan alamnya terus dikeruk habis guna keperluan pembangunan di negeri induk. Sudah barang tentu masyarakat Indonesia terutama lapisan terbawahnya yang paling merasakan kesengsaraan hidup. Rakyat dieksploitasi tenaganya untuk keperluan kerja paksa dengan upah yang rendah dan masih harus dibebani dengan pajak. Mereka hidup dalam keadaan kekurangan pangan, sandang, dan papan. Rakyat juga mengalami diskriminasi rasial dan selalu berada di pihak yang kalah lantaran tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi mereka (Ibrahim, 2004: 57).

Ingatan yang kuat tentang tidak berubahnya nasib rakyat sejak zaman kolonial itulah yang menjadi alasan mengapa Permesta mencantumkan tuntutan dihapuskannya sistem sentralisme dan diganti dengan sistem otonomi luas yang dianggap lebih cocok untuk melaksanakan pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan rakyat di segala bidang, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Adanya suatu majelis tinggi atau senat sebagai wakil-wakil daerah merupakan simbol dilaksanakannya tuntutan sistem otonomi luas tersebut.

Pergantian pucuk pimpinan AD sebenarnya merupakan langkah lanjutan dari acara reuni jebolan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD) yang diselenggarakan pada bulan November 1956 silam. 85 Sumual beserta para perwira lainnya menyimpulkan bahwa AD di bawah Nasution telah gagal dalam menjaga Indonesia dari kekacauan selama dekade 50-an. Malahan beberapa pimpinan AD terlibat dalam upaya kudeta pada tanggal 17 Oktober 1952 (Leirissa, 1991: 85).

Selama dekade 50-an terjadi perpecahan internal di kalangan tentara, terutama angkatan darat. Para perwira tentara terpecah belah dan tidak mengetahui peranan mereka yang sesungguhnya. Mereka kurang terpelajar ketimbang kaum politisi terkemuka dan kebanyakan sedikitnya 10 tahun lebih muda daripada mereka, sehingga masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk dapat berperan dalam panggung politik nasional (Ricklefs, 1998: 359).

Para pimpinan pusat dan daerah pun tak ketinggalan mengalami perpecahan. Pimpinan pusat yang berada di tangan Nasution, Simatupang, dan lain-lain menghendaki profesionalisme dalam dunia tentara sekaligus struktur hierarkis yang dapat dikendalikan. Sementara perwira daerah lebih menyukai semangat revolusi, desentralisasi militer, dan kelonggaran dalam struktur hierarkis (Ricklefs, 1998: 359-360).

Perpecahan itu menyebabkan pihak tentara gagal mengatasi kekacauan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi, sehubungan dengan pergolakan di berbagai daerah di pulau itu. Sikap KSAD yang hanya bertindak secara militer atas pergolakan-pergolakan itu tidak akan

menyelesaikan masalah jika tanpa disertai penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya (Leirissa, 1991: 122). Oleh sebab itu, para staf TT VII Wirabuana menuntut supaya diberi wewenang penuh untuk mengatasi pergolakan di wilayah kekuasaannya. Diperkirakan dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mengatasinya jika memang wewenang itu diberikan. Para perwira militer di Indonesia Timur juga menuntut pusat mengirimkan peralatan militer yang dibutuhkan untuk mensukseskan rencana mengatasi pergolakan daerah tersebut (Leirissa, 1991: 103-104).

Antara Primordial dan Nasional

Sebagaimana diketahui wilayah Indonesia yang telah memerdekakan diri sejak tanggal 17 Agustus 1945 terdiri dari beragam etnis dan agama, sehingga amat sulit dipersatukan. Kesulitan terjadi lantaran setiap kelompok etnik masih kental pandangan hidup primordialistiknya yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Oleh sebab itu, merupakan suatu terobosan historis, etnis, sosiologis apabila mereka sampai pada suatu tekad untuk bersatu dan melampaui batas-batas etnik, bahasa, dan latar belakang lainnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa yang kemudian lebih dikenal sebagai “Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928” itu akan semakin efektif jika diimbangi dengan proses “melupakan” ikatan-ikatan lama sambil meruntuhkan sekat-sekat etnik dan primordialisme negatif demi tercapainya cita-cita perjuangan melawan penjajahan.

Kendati demikian, unsur-unsur primordial masih sangat kuat mengikat masyarakat Indonesia yang berdiri atas berbagai kelompok etnik dan aliran agama/kepercayaan. Pada masa pergerakan nasional, kita mencatat bangkitnya berbagai organisasi primordialistik yang menggunakan simbol-simbol etnik dan/atau agama. Lihat misalnya Sarikat Islam yang semula organisasi sosial keagamaan kaum pedagang berubah menjadi partai politik. Demikian pula dengan Partai Arab Indonesia (PAI) dan organisasi pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa*, termasuk *Jong Islamieten Bond* yang menjadi bukti kebangkitan primordialisme (Pringgogidgo, 1967: 20-30).

Fenomena primordialisme muncul pula pada masa Revolusi Fisik tahun 1945-1950. Belajar dari betapa efektifnya organisasi baik yang bernausa etnik ataupun bernapaskan agama dalam perjuangan pergerakan, mengilhami rakyat untuk menggunakannya lagi dalam perjuangan memertahankan kemerdekaan nasional. Cukup banyak organisasi-organisasi kelaskaran yang berdiri, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa sebelum bahkan sesudah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kendati pemerintah telah melakukan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi TNI, badan-badan kelaskaran yang telah terbentuk tidak dengan sendirinya bubar.

Organisasi kelaskaran yang bernausa primordialisme juga muncul di Minahasa. Beberapa tokoh pejuang yang berasal dari badan kelaskaran seperti Daan Karamoy, Jan Timbuleng, Len Karamoy, Sam Mangindaan membentuk organisasi perlawanan Pasukan Pembela Keadilan (PPK) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah lantaran mereka dan pasukannya tidak diakui lagi sebagai anggota TNI. Mereka kemudian merekrut bekas pejuang yang juga diperlakukan tidak adil, merebut senjata-senjata TNI, dan kemudian masuk hutan serta melakukan perang gerilya. Mereka juga memperbesar jumlah anggota dengan merekrut para pemuda desa-desa pedalaman Minahasa dan berbaur dengan warga masyarakat. Banyak di antara anggota PPK ini yang nantinya bergabung dengan Permesta (Wawancara dengan Wim Dompas, 14 Februari 2010).

Sebenarnya pemerintah pusat sudah memprogramkan jaminan masa depan bagi para bekas pejuang, baik yang tergabung dalam berbagai badan kelaskaran maupun TNI. Para pejuang khususnya di Minahasa yang terkena kebijakan demobilisasi dibekali dengan berbagai keterampilan melalui pelatihan-pelatihan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Setelah mengikuti berbagai pelatihan itu, mereka diberi modal awal untuk membuka usaha.

Lantaran sebagian besar bekas para pejuang itu dulunya adalah petani, maka bagi yang berminat kembali ke sektor pertanian, ditawarkan mengikuti program transmigrasi dari Minahasa ke Bolaang Mongondow. Di

daerah itu disediakan lahan pertanian pada dua lokasi terpisah yaitu di antara Poigar Mongondow dan Inobonto, dan di dataran rendah Dumoga di pusat tanah Mongondow. Pada lokasi yang disebut pertama, terhampar areal berawa-rawa yang sangat subur yang siap digarap menjadi areal persawahan. Awalnya nama populer areal itu adalah transmigrasi Nonapan, sedangkan di pedalaman tanah Mongondow disebut transmigrasi Dumoga. Karakteristik daerah transmigrasi Nonapan dan Dumoga pada umumnya hampir sama. Perbedaannya adalah Dumoga jauh lebih luas daripada Nonapan lantaran hamparan areal berawanya puluhan ribu hektar (Wawancara dengan Wim Dompas, 14 Februari 2010). Selain mengerjakan lahan-lahan pertanian melalui program transmigrasi, sejumlah bekas pejuang ada pula yang tetap menjadi anggota militer dan melakukan perang gerilya sebagai langkah protes terhadap kebijakan demobilisasi yang dialamatkan kepada mereka.

Sementara itu, tuntutan agar segera dilaksanakan program-program pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan tidak hanya datang dari wilayah Indonesia Timur, tetapi juga sebelumnya dari Indonesia bagian Barat, khususnya di Sumatra. Kota Padang di Sumatra Barat menjadi pusat protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan daerah-daerah di luar Jawa. Selain di Padang, tuntutan perubahan juga muncul dari kota Palembang. Di sana di bawah pimpinan Letkol Barlian, para tokoh sipil dan adat pada tanggal 15-16 Oktober 1956 melaksanakan Kongres Adat Sumatra Selatan yang menghasilkan "Piagam Perjuangan Rakyat Sumatra Selatan". Penyatuan kekuatan militer dan sipil di Sumatra Selatan itu bernaung di bawah Dewan Garuda dengan mengambil nama institusi militer yang dulu pernah ada, yakni Divisi Garuda. Letkol Ahmad Husein menginisiasi pertemuan para perwira aktif dan nonaktif di Sumatra Tengah dan membentuk Dewan Banteng, sedangkan di Sumatra Utara dibentuk Dewan Gajah (Zed dan Chaniago, 2001: 162).

Tuntutan yang paling nyaring sebenarnya dialamatkan pada pimpinan TNI yang belum juga mengabdikan aspirasi para petinggi TNI

agar dilakukan pergantian pada pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Suatu hal yang wajar apabila tuntutan-tuntutan yang dialamatkan kepada Pemerintah Pusat oleh tokoh-tokoh militer, baik dari Indonesia Timur maupun Indonesia Barat itu kemudian merintis langkah-langkah ke arah persatuan tuntutan bersama. Hal ini terlihat ketika sejumlah tokoh militer lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) memberikan informasi kepada atasan mereka, Nasution, dalam bentuk “Pernyataan Korps Perwira SSKAD”. Isi penting dari pernyataan itu adalah mengingatkan KSAD bahwa gejolak yang timbul pada beberapa daerah di luar Jawa melibatkan para tokoh “Pejuang 1945” baik dari kalangan militer maupun sipil yang justru didorong oleh keinginan luhur mempercepat pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat dikenakan hukum militer semata lantaran justru sedang berjuang melanjutkan semangat membela rakyat dan ingin membebaskannya dari kemiskinan dan ketertinggalan (Pernyataan Korps Perwira SSKAD, 21 Maret 1957). Dengan kata lain, pernyataan tertanggal 21 Maret 1957 ini sekadar ingin membangkitkan ingatan historis betapa eratnya hubungan tentara dengan rakyat semasa revolusi kemerdekaan.

Pernyataan perwira SSKAD di atas mendapat reaksi keras dari KSAD. Nasution kemudian membebastugaskan beberapa perwira daerah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Untuk menyelesaikan konflik di kalangan tentara itu, Perdana Menteri Djuanda berinisiatif untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 1957. Satu bulan sebelum Munas, Sumual bertemu Djuanda dan tercapailah kesepakatan untuk mengadakan pertemuan pendahuluan di Palembang guna meyakinkan para perwira di Sumatra bahwa partisipasinya amat diperlukan dalam Munas mendatang (Leirissa, 1991: 141-145).

Sumual kemudian menemui para pimpinan militer wilayah Sumatra di kota Palembang. Djuanda menghendaki agar aspirasi rakyat dari daerah-daerah bergolak di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu dapat disatukan sebagai bahan perbincangan dalam Munas.

Pertemuan para perwira militer itu menghasilkan Piagam Palembang mirip dengan apa yang termaktub dalam Piagam Permesta yang intinya yaitu: (1) Pemulihan dwitunggal Soekarno-Hatta; (2) Pergantian pimpinan Angkatan Darat; (3) Otonomi daerah; (4) Pembentukan senat; (5) Peremajaan birokrat; dan (6) Larangan terhadap komunisme di Indonesia (Sinolungan, 2016: 86-87).

Sama seperti isi yang terkandung dalam Piagam Permesta, para perwira militer di Indonesia Barat mengajukan tuntutan pulihnya dwitunggal Sukarno-Hatta. Pemulihan Dwitunggal tidak akan banyak berarti jika Hatta tidak diberi jabatan dan fungsi yang konkret. Lantaran tidak diberi wewenang sesuai kemampuannya, maka tidak mengherankan apabila Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956 (Leirissa, 1991: 146).

Selanjutnya tuntutan agar pemerintah pusat membubarkan PKI menunjukkan betapa membekasnya memori akibat pengkhianatan kaum komunis semasa revolusi fisik pada bulan September 1948. Pemerintah pusat seakan sengaja membiarkan PKI meluaskan pengaruh dan kekuasaannya. Bagi Permesta, keberadaan PKI bertentangan dengan Pancasila. Paham komunis yang dianut PKI tidak mengakui adanya Tuhan (atheis), sementara Pancasila justru mengakui adanya Tuhan yang termaktub dalam sila pertamanya (Tengker, 2009: 13).

Sebuah Verifikasi

Jika kita menyimak lebih jauh, pokok-pokok terurai dari Piagam Perjuangan Semesta tanggal 2 Maret 1957 itu mengisyaratkan adanya ingatan mengenai penderitaan dan kesengsaraan rakyat pada periode kolonial sekaligus kemenangan perjuangan kemerdekaan. Dokumen itu justru lahir dari kesinambungan perjuangan setelah selesainya perjuangan fisik yang perlu terus dilanjutkan dengan perjuangan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan akibat penjajahan Belanda.

Kaum politisi silih berganti menjalankan roda pemerintahan di bawah sistem demokrasi parlementer. Kepentingan merebut kekuasaan politik dalam berbagai posisi pemerintahan ternyata meminggirkan tugas

utamanya yang seharusnya mengabdikan bagi kepentingan rakyat banyak. Tugas nasional membangun bangsa harus mengalah pada kepentingan berbagai partai politik yang saling berebut kekuasaan dalam sistem pemerintahan liberal. Rakyat hanya menjadi saksi dan penonton dalam pergulatan perebutan kekuasaan politik tersebut.

Peristiwa Permesta menyebabkan dua tokoh militer yang berasal dari Indonesia Timur sengaja disingkirkan dari Angkatan Darat, tanpa mempedulikan jasa dan pengorbanannya selama zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Keduanya adalah Kolonel Joop Warouw, yang selepas menjabat sebagai Panglima TT VII/Wirabuana di Makassar, ditugaskan sebagai atase militer di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (Parengkuan, 2010). Sementara yang kedua adalah mantan Panglima TT III/Siliwangi, Kolonel A.E. Kawilarang, yang diperintahkan mengisi pos atase militer di Washington, Amerika Serikat (Ramadhan, 1988).

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, pada tanggal 2 Maret 1957 Sumual mengumandangkan Proklamasi Perjuangan Semesta dan menyatakan wilayah kekuasaan TT VII/Wirabuana berada dalam keadaan darurat perang. Setelah mengumumkan daurat perang, Sumual membagi wilayah Indonesia Timur menjadi empat wilayah militer yang masing-masing dipimpin seorang gubernur militer, yakni:

1. Gubernur Militer Sulawesi Selatan/Tenggara, Andi Pangerang;
2. Gubernur Militer Sulawesi Utara, Mayor D. Jus Somba, Komandan Resimen-24;
3. Gubernur Militer Maluku dan Irian Barat, Letkol T.H. Pieters, Komandan Resimen Infanteri-25; dan
4. Gubernur Militer Nusa Tenggara, Letkol Minggu, Komandan Resimen Infanteri-26. 319

Langkah yang ditempuh Ventje Sumual itu menimbulkan kecurigaan pemerintah pusat di Jakarta. Nasution ingin membekukan TT VII/Wirabuana sekaligus membentuk Komando Antar Daerah Indonesia Timur (KOANDAIT) di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto. Empat komando daerah militer yang direncan-

nakan oleh Sumual segera diambil alih oleh Nasution dengan meresmikan KDM-SST di bawah Panglima Letkol Andi Matalatta, KDM Bali/Nusa Tenggara di bawah Letkol Minggu, KDM Maluku/Irian Barat di bawah Letkol H. Pieters, dan KDM-SUT di bawah Letkol D.J. Somba. Keempat panglima daerah ini berada di bawah Kolonel Gatot Soebroto sebagai Panglima KOANDAIT. Kebijakan militer yang melupakan pengorbanan dan jasa seorang Letkol Ventje Sumual menyebabkan tokoh yang sejatinya ingin melaksanakan pembangunan daerah guna mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan kehilangan kekuasaannya secara drastis. Tidak ada jalan lagi selain pulang ke tanah leluhur guna mempersiapkan langkah selanjutnya (Leirissa, 1991: 116-122).

Sementara itu, selain di wilayah Indonesia Timur, pergolakan juga terjadi di bagian Indonesia Barat. Kelompok sipil dan militer dengan dukungan rakyat setempat membentuk kekuatan dan mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pemimpinnya. Pembentukan PRRI ditujukan sebagai alternatif Kabinet Djuanda yang tidak lagi memperoleh kepercayaan dari daerah-daerah yang bergolak. Kedudukan PRRI terasa semakin kuat dengan ikut bergabungnya tokoh-tokoh Permesta sekitar medio Februari 1958 (Leirissa, 1991: 210-213). Kecurigaan lama bahwa daerah-daerah bergolak ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia semakin menguat, apalagi ketika PRRI yang didukung Permesta memberikan ultimatum kepada Pemerintah Pusat Jakarta agar segera memenuhi semua tuntutan, dimana salah satunya adalah mendemisionerkan Kabinet Djuanda.

Kekhawatiran yang selama ini ditakutkan oleh daerah-daerah bergolak termasuk Minahasa pun terjadi. Pagi hari tanggal 22 Februari 1958 deru mesin pesawat tempur milik Angkatan Udara ditambah dengan bantuan Uni Soviet memenuhi udara kota. Pemerintah pusat mengerahkan pasukan-pasukan yang terdiri atas puluhan batalion, infanteri khusus, bantuan dari AD, serta satuan-satuan dari AL dan AU maupun kapal-kapal pengangkut dan penumpang milik PELNI (Leirissa, 1991: 214). Ketenteraman dan

kedamaian warga kota menjadi sirna berganti dengan ketakutan dan kegelisahan. Genderang perang saudara telah ditabuh.

Masih kuat ingatan rakyat di daerah Minahasa yang seakan tidak sempat benar-benar menikmati masa kedamaian selepas masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dekade tahun 1950-an masih diliputi suasana ketakutan akibat ulah kaum gerilya PPK yang menebar teror di desa-desa pedalaman. Ribuan rakyat mengungsi dari pedalaman ke kota-kota dan tempat-tempat lain yang dirasa cukup aman seperti halnya kota Manado. Belum usai kekacauan akibat gerakan kaum gerilya itu, rakyat Minahasa harus kembali menerima kenyataan pahit dinyatakan sebagai daerah yang memusuhi pemerintah pusat Jakarta (Wawancara dengan Wim Dompas, 14 Februari 2010).

Dalam keadaan kacau seperti itu, penguasa militer Permesta kemudian mengumumkan mobilisasi umum dan langsung disambut oleh para pemuda Minahasa yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk masuk dinas militer. Pasukan-pasukan gerilya PPK pun ikut bergabung di bawah panji-panji Permesta. Kaum perempuan tergabung dalam kesatuan Pasukan Wanita Permesta (PWP), sementara anak-anak sekolah terhimpun dalam Corps Tentara Pelajar (CTP). Para mahasiswa yang didominasi oleh Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Tondano diwadahi dalam Corps Mahasiswa (CM). Para pemuda lainnya yang tidak masuk dinas militer tergabung dalam Komando Pemuda Permesta (KoP2). Pasukan militer reguler yang berasal dari TNI jajaran KDM-SUT diperkirakan hanya berkekuatan satu kompi di bawah komando Letnan Kolonel D.J. Somba selaku panglimanya. Mereka diperkuat oleh satu peleton pasukan elite TNI dari kesatuan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang kebetulan sedang mengambil cuti dari Bandung ke kampung halaman Minahasa (Sulu, 1997: 19-23).

Terlihat di sini betapa spontannya reaksi rakyat Minahasa terhadap sikap keras pemerintah pusat yang menyerang daerah mereka pada bulan Februari 1958. Mereka yang sebelumnya tidak peduli dengan apa yang disebut Permesta, tiba-tiba saja sudah

menentukan sikap bergabung melawan ancaman militer pusat. Ada nuansa kebangkitan primordialisme lama di sini yang membangun solidaritas perlawanan terhadap tindakan pemerintah pusat yang dianggap semena-mena. Mereka berpandangan bahwa bukannya memberikan reaksi positif dan mendahulukan dialog dalam upaya penyelesaian secara damai, pemerintah pusat malah memilih opsi militer sepihak guna memaksakan kehendak (Wawancara dengan Wim Dompas, 14 Februari 2010).

Pandangan serupa juga muncul di kalangan warga Minahasa perantauan, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk para pelaut sipil yang bekerja di kapal-kapal penumpang asing. Contohnya adalah tulisan dari Mailangkay yang menjadi masinis pada sebuah kapal dagang KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) milik Belanda. Mailangkay dan teman-temannya sesama Minahasa sedang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di kapal KPM bernama MS Paloh. Dalam pelayarannya di Laut Jawa, tiba-tiba terdengar perintah agar semua kapal dagang milik KPM segera mengalihkan pelayaran ke Singapura. Setibanya di sana barulah mereka mengetahui bahwa perang saudara sudah dimulai. Dengan didorong oleh rasa solidaritas yang kuat, mereka ingin segera pulang ke Minahasa agar dapat turut memertahankan daerahnya dari tekanan militer pemerintah pusat. Rasa solidaritas yang mengakar pada primordialisme etnik spontan muncul di hati mereka (Mailangkay, 2016).

Solidaritas etnik juga muncul dalam diri Kolonel Joop Warouw yang ditugaskan sebagai atase militer di Beijing dan Kolonel A.E. Kawilarang dalam jabatan yang sama di Washington. Keduanya menyesali langkah dan tindakan keras pemerintah pusat terhadap daerah Minahasa sebagai tanah kelahirannya. Ada ingatan kolektif Keminahasa dalam diri kedua tokoh militer itu tentang pengabdian warga Minahasa dalam perjuangan penuh pengorbanan sewaktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya, gerilya Gunung Kawi, pendudukan Yogyakarta oleh pasukan gerilya, serta berbagai episode penuh heroisme dan patriotisme pada periode itu

rupanya tetap bergelora dan kenangan masa lalu seakan terwujud kembali. Mereka melihat terdapat unsur ketidakadilan yang melanda tanah leluhur Minahasa yang mendorongnya melebur dalam perjuangan bersama melawan ketidakadilan seperti dulu (Leirissa, 1991: 79-82).

Selain kedua tokoh militer di atas, kalangan pemuda sipil yang bahkan masih duduk di bangku sekolah juga ikut tergugah untuk berjuang mempertahankan tanah leluhur Minahasa dari serangan militer Kabinet Djuanda. Di antara beribu-ribu pemuda Minahasa yang ikut berjuang dalam berbagai kesatuan militer Permesta, terdapat beberapa di antaranya yang sempat menulis kembali ingatan lama menjadi sebuah buku kenangan dan biografi. Dapat disebut dua bersaudara kakak beradik W.E. Lumintang dan F.H.D. Lumintang (Lumintang dan Lumintang, 2007), pemuda J. Lasut (Lasut, 2010), pelaut J.F. Mailangkay (Mailangkay 2016) juga seorang pemuda Phil M. Sulu (Sulu, 1997). Ada pula beberapa penulis lain yang dulunya pernah menjadi pelaku bahkan sebagai perwira militer dalam kesatuan Permesta, di antaranya adalah Wim Dompas (Dompas, 2008) dan A.E. Sinolungan (Sinolungan, 2016). Dompas sebelumnya pernah berdinasi aktif sebagai bintara senior dalam TNI. Lantaran merasa harus memenuhi panggilan memertahankan tanah Minahasa, maka dengan suka rela masuk dalam kesatuan Permesta dan terakhir sebagai kapten dengan jabatan penting sebagai Komandan Detasemen Komando (Dandetko) yang bertugas mengawal para petinggi Permesta. Sinolungan yang menjadi mahasiswa di PTPG Tondano, masuk sebagai anggota CM dan terakhir sebagai perwira staf operasi suatu pasukan Permesta. Seperti halnya Dompas, ia pun tergugah untuk bangkit membela Minahasa sebagai tanah tumpah darahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Permesta merupakan gerakan yang dipelopori oleh Panglima TT VII Wirabuana, Ventje Sumual, pada bulan Maret 1957. Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan keteringgalan daerah-daerah di Indonesia Timur, termasuk di wilayah Sulawesi

Utara. Gerakan itu dengan cepat mendapat simpati dari masyarakat umum yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Sikap dan tindakan pemerintah pusat selama dekade 50-an yang dianggap merugikan daerah di luar Jawa mendapat perlawanan dari Permesta. Perlawanannya dilandasi oleh beberapa ingatan kolektif mengenai periode sebelumnya. Ingatan tentang sistem sentralistik Belanda yang diadopsi Indonesia, yang menimbulkan penderitaan rakyat menjadi faktor pendorong pertama. Kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan yang mengeruk habis kekayaan alam daerah-daerah di luar Jawa guna kepentingan Pulau Jawa juga turut menjadi faktor pendorongnya. Ingatan mengenai PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 juga tidak dapat dianggap remeh. Namun, pemerintah justru membiarkan partai itu semakin berkembang, bahkan mampu memanasi-manasi Soekarno untuk mematahkan perlawanan Permesta dengan kekuatan senjata.

Berbagai memori kolektif itu mendorong para pemimpin militer dan sipil di tubuh Permesta melakukan tindakan yang bersifat inisiatif seperti halnya yang biasa mereka lakukan dalam masa-masa sulitnya komunikasi dengan pemerintah pusat dalam peperangan melawan tentara kolonial guna dengan segera mengangkat rakyat dari kubangan kemiskinan dan keterbelakangan. Namun, inisiatif yang telah dilakukan oleh para tokoh Permesta dianggap pengingkaran terhadap pemerintah. Langkah inisiatif itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan, apalagi setelah memutuskan untuk bergabung bersama PRRI di Sumatra. Pemerintah pusat yang masih trauma dengan pembangkangan Kartosuwiryo di Jawa, Daud Beureuh di Aceh, Ibnu Hadjar di Kalimantan, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan termasuk separatisme RMS di Maluku, tidak mau terlalu lama terjebak dalam perundingan, sehingga memutuskan cepat-cepat memilih opsi tindakan militer, baik di Sumatra maupun di Sulawesi. Akibatnya terjadilah perang saudara yang meminta tumbal berupa jatuhnya banyak korban sia-sia di kedua belah pihak dan menyisakan narasi berupa “Pemberontakan Permesta” dalam sejarah resmi pemerintah.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan tulisan yang telah dikemukakan di atas, terdapat sejumlah saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat hendaknya memperhatikan kesejahteraan daerah-daerah agar peristiwa perang saudara seperti kasus Permesta tidak terjadi lagi.
2. Penelitian yang melihat suatu peristiwa dari sudut pandang memori kolektif para pelakunya hendaknya digalakkan lantaran dapat menguak mengapa ingatan tertentu dapat berkembang dan menjadi pendorong suatu tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan (ed.). 2015. *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*. Yogyakarta: Ombak.
- Dokumen Sedjarah 1957. "Pernyataan Korps Perwira SSKAD" tertanggal 21 Maret 1957. [Tidak diterbitkan].
- Dompas, Wim F. 2008. *Pejuang dari Utara. Mereka yang Terlupakan*. [Editor: Fendy E.W. Parengkuan]. [Belum diterbitkan]. Manado: MSI Cabang Sulawesi Utara.
- Ibrahim, Julianto. 2004. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan: Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Wonogiri: Bina Citra Pustaka.
- Lasut, Jopie. 2010. *Kesaksian Seorang Gerilyawan Permesta-RPI*. Depok: Yayasan Penghayat Keadilan.
- Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti.
- Lumintang Willem Engelbert. & Fredy Hansje Daniel Lumintang. 2007. *Korps Permesta, Hakekat dan Bagian Hidupku*. Manado: Corps Tentara Pelajar, Resimen Ular Hitam, Brigade Sinobatu, Batalyon V, dan Kompi I.
- Mailangkay, J.F. 2016. *Permesta: Commando Sea Bird*. Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Parengkuan, Fendy E.W. 2010. *Dokumenta Historika Permesta Kita*. [Belum

diterbitkan]. Manado: MSI Cabang Sulawesi Utara.

- Parengkuan, Fendy E.W. 2016. "Perjuangan Semesta dalam Lintasan Sejarah Kita". Makalah dipresentasikan pada Dialog Kesejarahan Tahun 2016, Manado.
- Pringgodigdo, A.K. 1967. *Sedjarah pergerakan rakjat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Ramadhan, K.H. 1988. *A.E. Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih (Pengalaman 1942-1961)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sinolungan, Adolf E. 2016. *Permesta-PRRI: Mengawal Negara Proklamasi 1945 Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sinolungan, Adolf E. 2016. "Ideologi Pancasila dan Permesta". Makalah dipresentasikan pada Dialog Kesejarahan Tahun 2016, Manado.
- Sulu, Phil. M. 1997. *Permesta: Jejak-jejak Pengembaraan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tengker, Benny. 2009. *Inga . . . Inga Permesta pe Perjuangan*. Jakarta: Asmi Publishing.
- Zed, Mestika & Hasril Chaniago. 2001. *Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Daftar Wawancara:

Wim Dompas, 14 Februari 2010

